



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

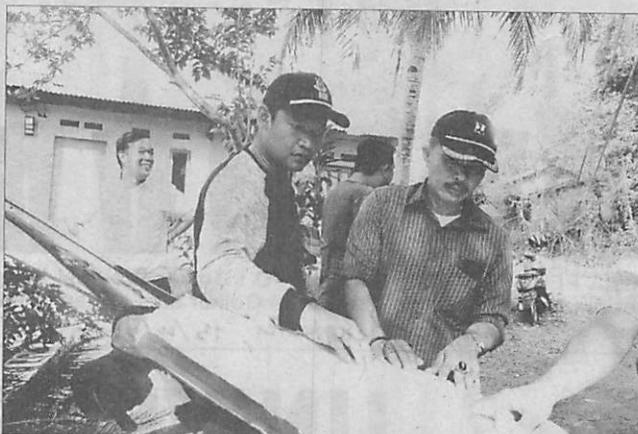
POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Masih Butuh Ahli Hukum Pertanahan

Kerugian Negara Ditaksir Rp 10 M

BENGKULU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu ternyata masih membutuhkan keterangan dari ahli hukum pertanahan dalam melakukan koordinasi perhitungan kerugian negara di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu penyidik melakukan koordinasi ke Rektorat Universitas Bengkulu (Unib) terkait ahli hukum pertanahan. Ini dilakukan dalam pengusutan kasus lahan hibah Pemkot Bengkulu seluas 62,9 hektare dimana 8,6 hektare diantaranya diduga dijual oleh oknum warga.

Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH, MH membenarkan hal tersebut. Bahwa penyidik setelah melakukan koordinasi dengan BPKP ternyata masih membutuhkan keterangan dari ahli hukum pertanahan. "Penyidik sedang berkordinasi dengan rektorat Unib, kita harapkan segera selesai," ujarnya. Ia menambahkan, sebelumnya telah menerima hasil penilaian tim appraisal atas nilai objek lahan hibah seluas 8,6 hektare itu, Senin (11/11) lalu.



YUDI/RB

TINJAU: Penyidik Pidsus Kejari Bengkulu saat melakukan peninjauan dengan melihat peta salinan dari lahan hibah Pemkot Bengkulu seluas 8,6 hektare yang dijual oleh oknum tidak bertanggung jawab, beberapa waktu lalu.

Dimana untuk hasil penilaian tersebut merupakan perkiraan kerugian negara yang mana dibutuhkan oleh BPKP dalam melakukan audit. Bila sudah ada besaran pasti kerugian negara, ia memastikan siapapun yang terkait dalam perbuatan merugikan keuangan negara (menjual lahan hibah) akan terseret sebagai tersangka. "Ya tinggal itu lagi, yang lainnya sudah, bahkan hasil tim appraisal kan sudah kita terima, untuk besarnya sendiri belum bisa saya sampaikan," singkatnya.

Menurut informasi yang didapati RB di lapangan, hasil

penilaian appraisal terkait lahan seluas 8,6 hektare yang dijual oknum tak bertanggung jawab cukup fantastis. Betapa tidak, angka dari hasil penilaian tersebut lebih dari Rp 10 miliar yang mana terindikasi bahwa kerugian negara dalam perkara ini juga demikian. Hal itu mengingat bahwa tim appraisal melakukan penilaian terhadap lahan seluas 8,6 hektare yang diduga dijual oleh oknum tidak bertanggung jawab itu dengan menilai harga jualnya sesuai perhitungan mereka. Yakni melihat lokasi lahan, kondisi lahan dan sebagainya.(cup)